

MANAJEMEN *KERINGAT* OLEH POLRI: Mencegah Konflik Terkait Pemilu

Oleh : Adrianus Meliala

PENDAHULUAN

Dalam hampir setiap event besar bangsa ini, Polri selalu berada pada posisi yang determinatif dalam rangka menjamin ketertiban dan keamanan. Oleh karena determinatif, maka posisi Polri pun semakin menentukan atau *decisive*.

Selain membanggakan, "posisi yang determinatif" tersebut sebenarnya juga menempatkan Polri sebagai pihak yang selalu bisa dan rentan disalah-salahkan pada setiap perkembangan situasi. Kalau bukan Polri yang dituding bila terjadi pencurian dan berbagai gangguan keamanan, lalu siapa lagi? Dewasa ini, sudah sulit mencari kilah seperti di masa-masa sebelumnya mengingat Polri-lah penanggungjawab kamtibmas di dalam negeri.

Hal ini tentu bisa menjadi sumber frustrasi di kalangan Polri, khususnya mereka yang sudah sehari-hari tak pulang ke

rumah, kurang tidur ataupun kurang uang. Gumaman "berhasil belum tentu, cercaan sudah pasti" sejauh ini tetap marak di antara anggota Polri.

Dalam konteks itulah, minimal secara kebijakan, timbul kebutuhan untuk memanajemeni masalah dan membagi beban dalam rangka menetralsir masalah tersebut. Tujuannya adalah, agar tidak semua beban dan masalah tersebut memuncak pada satu ketika, menajam pada satu masalah atau menumpuk pada satu-dua pihak saja.

Dengan ketiadaan masalah yang betul-betul berat, di mana banyak pihak yang ikut memikulnya guna diselesaikan dalam kurun waktu tertentu, diharapkan titik ledak atau kulminasi tidak terlampaui. Dalam konteks kepolisian, kulminasi bisa berupa timbulnya *individual/organizational burn out* atau "kelelahan kerja individu atau organisasi".

Diberitakan, sebagai contoh, pasukan Amerika Serikat di Irak dewasa ini telah dihinggapi kelelahan

¹ Kriminolog FISIP UI, Adviser Partnership for Governance Reform in Indonesia, Penasihat Ahli Kapolri, Dosen PTIK dan S-2 KIK/UI.

yang diindikasikan melalui peningkatan permintaan pulang, indikasi depresi dan bahkan kasus bunuh diri berkaitan dengan penugasan yang berat, di mana musuh tidak lagi jelas. Hal mana, ujung-ujungnya, menempatkan mereka sebagai umpan peluru para militan Irak.

Dengan bahasa populer, manajemen pengaturan masalah dan beban tersebut disebut “manajemen keringat”. Keringat mengindikasikan adanya energi yang dilepas dalam rangka melakukan perilaku tertentu. Lebih banyak keringat, artinya lebih banyak aktivitas fisik yang memungkinkan individu merasa lelah. Padahal, keringat yang terlalu banyak keluar tidak selamanya berarti pekerjaan selesai.

Tulisan ini akan memfokuskan pembahasan tersebut dengan mempergunakan topik pemilu, khususnya 2004, sebagai kasus. Aktivitas pemilu, baik pemilu-pemilu yang lalu maupun yang akan datang, selalu menuntut perhatian khusus mengingat permasalahannya, khususnya karakteristik konflik yang potensial untuk ditimbulkannya.

AWAL SAMPAI AKHIR

Tak salah bila dikatakan, Polri adalah elemen bangsa yang paling berkeringat dengan Pemilu 2004. Hampir semua tahapan pemilu mengandung potensi kerawanan, baik konflik maupun penyimpangan, dan oleh karenanya menjadi *justified* untuk ditangani kepolisian.

Oleh karena itu, adalah penting untuk diingat, keringat jangan dikururkan di awal saja. Di akhir tahapan pemilu pun, mesti sama baiknya. Ingat, rangkaian pemilu berlangsung 6 bulan. Bahkan, bila dihitung dari saat pendataan pemilih, maka mencapai 12 bulan; rangkaian pemilu terpanjang di dunia. Apa yang sudah berlangsung hingga saat ini harus dapat dilihat sebagai modal guna menyelesaikan proses ini sampai akhir dengan baik.

Satu hal yang merupakan modal, walau sebenarnya dapat pula diartikan secara negatif, adalah fakta bahwa konflik (dan kemudian menjelma menjadi gangguan kamtibmas) sebenarnya tidak hanya terjadi antar parpol, tetapi juga di dalam atau intra parpol.

Telah terlihat dalam kampanye calon legislatif yang lalu, masing-masing calon memperjuangkan partainya secara tidak sepenuh hati. Hal ini bisa dimaklumi, mengingat dirinya sendiri perlu pula diperjuangkan agar bisa masuk parlemen. Alhasil, yang terlihat adalah kampanye berbentuk penonjolan diri sendiri dengan pengenyampingan lembaga parpolnya.

Dari sudut Polri, hal ini sebenarnya amat membantu dari segi semakin lemahnya kemampuan masyarakat memproduksi kekerasan atau konflik yang bersifat massal dan berdaya dobrak besar.

Dalam kaitan tahapan-tahapan yang rawan tersebut, kemungkinan besar, keringat Polri tidak akan banyak keluar pada saat pemilu tahap pertama yang telah berlangsung, tetapi akan terkuras saat pemilu tahap kedua. Pada tahapan pemilu guna memilih presiden dan wakil presiden tersebut, massa dapat dengan mudah dibelah dan sekaligus mudah pula dimainkan emosinya oleh para pendukung kandidat tertentu.

Oleh karena itu, ke depan, perlu terus diciptakan suasana agar jangan hanya Polri saja yang berkeringat menenangkan situasi.

Perlu terus diupayakan agar masing-masing parpol peserta pemilu sendiri berupaya mengamankan suasana. Bukankah yang paling dirugikan oleh konflik adalah pihak yang terlibat itu sendiri?

Sejauh berdasarkan aktivitas kampanye calon legislatif yang lalu, suasana itu nampaknya telah terlihat. Walaupun, tetap saja terlihat adanya pimpinan parpol yang seolah-olah cuci tangan dan *ogah* berkeringat atas ketidaberesan yang terjadi menyangkut aktivitas massanya.

Strategi mengasosiasikan timbulnya keributan dan kekerasan terkait pemilu sebagai sesuatu yang hanya akan merugikan si kandidat sendiri, sebenarnya ampuh untuk diteruskan. Biarlah si kandidat sendiri yang berkeringat melihat implikasi dari kekerasan, permainan uang hingga insinuasiprovokasi yang dilakukan pendukungnya.

GANGGUAN

Salah satu kemungkinan gangguan yang kelihatannya amat diperhitungkan oleh Polri adalah teror. Hantaman teror yang telak dan menimbulkan korban akan membawa perubahan besar pada *mood* politik para pemilih.

Kasus Spanyol yang tiba-tiba dihantam teror kereta api menjelang pemilu Maret 2004 lalu oleh kelompok Al-Qaeda (dengan alasan telah mendukung Amerika Serikat menyerang Irak) dan mengakibatkan 200 orang tewas, adalah contoh terbaik. Teror itu mengakibatkan publik Spanyol tidak lagi memilih partai yang tengah berkuasa dan selama ini dikenal sebagai pendukung Bush.

Mereka yang menghalalkan teror tentunya melihat hal ini sebagai indikasi bahwa teror ternyata fungsional dan efektif. Menyadari itu, selalu mungkin teror akan terus dieksploitasi demi kepentingan mereka atau kelompok yang mereka dukung.

Berkaitan dengan serangan teror, demikian pula peningkatan konflik horisontal atau gangguan keamanan pada umumnya, diduga akan menghindari fase di mana Polri masih segar-bugar dan waspada. Akan tetapi, dinamikanya diperkirakan akan melonjak pada saat-saat atau pada tempat-tempat dimana Polri telah berkeringat tanda mulai kelelahan. Menjaga kota-kota besar, misalnya, selalu sulit. Apalagi, bila tengah terjadi mobilisasi fisik yang besar-besaran.

Dalam kaitan itu, suasana kampanye caleg maupun kampanye calon presiden/wakil presiden mutlak mendapat perhatian.

Kalaupun Polri tidak mau kecolongan secara fisik, misalnya ditandai dengan pengiriman pasukan-pasukan polisi tambahan ke beberapa daerah rawan ataupun pengawasan terhadap pergerakan logistik pemilu, kecolongan bisa berasal dari sikap personil Polri sendiri. Sikap terlalu percaya diri gampang muncul ketika merasa sudah menguasai situasi atau ketika situasi sudah aman. ketika itulah, serangan teroro bisa menerpa tanpa terduga.

Gangguan juga bisa muncul dari satu atau lebih elemen bangsa yang, entah kenapa, tidak ingin melihat bangsa ini aman. Kasus meledaknya bom Cimanggis saat kampanye caleg baru saja dimulai Maret 2004 yang lalu, adalah salah satu buktinya.

Bila gangguan datang dari mereka-mereka yang jelas disebut dan menyebut diri GPK (Gerombolan Pengacau Keamanan) seperti terjadi di Aceh dan Papua, itu memang wajar. Tapi, bila gangguan itu datang dari mereka yang me-

nyebut diri "abdi negara", maka analisis politik memang bisa jungkir balik.

Oleh karena itu, adalah baik bila selalu waspada dan jeli melihat gerak-gerik elemen bangsa, entah siapa, yang tidak selalu gembira dan legowo melihat keringat Polri yang berjatuhan tatkala mengamankan perhelatan bangsa ini.

Agar seimbang, sebenarnya, gangguan juga tetap dapat berasal dari kasus dan masalah sehari-hari. Kemacetan, banjir, tawuran pelajar, kejahatan ringan seperti pencopetan dan pencurian ataupun bersliwerannya isu-isu yang membuat resah, tetap perlu diperhatikan polisi.

Dewasa ini, misalnya, terdapat fakta bahwa perdagangan narkoba, pembunuhan dan pemerkosaan meningkat terus selama tiga tahun terakhir. Beberapa jenis kejahatan non-kekerasan, seperti kejahatan terkait internet maupun peredaran uanga palsu, juga naik tajam. Bila terhadap pembunuhan dan perkosaan masih tersedia kilah bahwa hal itu bisa dilakukan tanpa terencana (*unpremeditated*) sehingga susah dicegah, tidak demikian halnya dengan kejahatan terkait narkoba.

Maka, saat berkeringat mengamankan Pemilu 2004 ataupun *event-event* lain yang bersifat insidental, janganlupa tetap memberikan atensi pada pemeliharaan ketertiban masyarakat pada umumnya. Bila tidak terjaga dengan baik, Polri akan dobel berkeringat guna mengendalikannya setelah telanjur besar.

Perlu diingat, saat rangkaian pemilu telah usai, maka Polri sebenarnya masih harus berkeringat guna "mencuci piring" berupa ekses-ekses pemilu. Agar tidak terlalu banyak piring tercuci nantinya, maka kendali yang ketat terhadap semua jenis gangguan tersebut seyogyanya dilakukan sejak dini. Walau diakui, dalam praktek memang tidak terlalu mudah melakukan hal itu mengingat sumber daya memang terbatas sementara bidang yang membutuhkan alokasi sumber daya banyak sekali.

KACAMATA KUDA

Para praktisi di bidang manapun selalu mungkin terjebak dengan "situasi kacamata kuda". Situasi itu menunjuk pada cara pandang para praktisi yang terbatas pada lingkungan kerjanya saja. Mereka sibuk dan merasa telah berbuat banyak dalam wilayah kerja

mereka, tanpa menyadari bahwa sebenarnya terdapat problema yang lebih luas. Atau, tanpa menyadari sumber masalah sebenarnya berada di luar jangkauan mereka.

Polisi pun tak terlepas dari situasi tersebut.

Setiap Polisi, misalnya, bisa saja telah sibuk mengerjakan tugasnya masing-masing, tanpa menyadari bahwa (dengan asumsi masing-masing bekerja dengan baik) sebenarnya terdapat kontradiksi dalam pekerjaan mereka. Bila Polisi bekerja baik dalam konteks pencegahan kejahatan, maka mestinya tak ada lagi keringat jatuh bagi Polisi yang mengurus pengungkapan atau penindakan kejahatan. Sebaliknya, keringat Polisi di fungsi penindakan mungkin mengindikasikan ada pihak yang tidak atau kurang berkeringat difungsi bina mitra dan intelijen.

Contoh lain, kerja berkeringat seperti mengejar penjahat atau menghalau pengunuk yang destruktif, memang gagah dan banyak digemari. Tapi, salah besar bila Polisi hanya bersibuk diri menangani hal ini. Karakteristik masyarakat dan tantangan keamanan dewasa ini juga menuntut

keringat yang tak kalah banyak dari personil yang melakukan aktivitas suluh dan sambang masyarakat.

Situasi serupa juga terjadi tatkala anggota Polri merasa telah berbuat dan bahkan bekerja keras. Padahal, sekadar berbuat saja tidaklah cukup. Demikian pula, telah bekerja keras juga belum tentu berarti bekerja secara efisien. Keringat yang banyak keluar tidaklah mesti berkaitan dengan perbaikan citra atau semakin baiknya hasil kerja. Maka, berkeringatlah dengan smart (*cerdas*).

Ketika masih cukup banyak anggota Polri yang bangga bisa menjalankan (atau memberi tugas) tugas walau tanpa dibekali (atau membekali) anggaran, "situasi kacamata kuda" sebenarnya telah tercipta. Tanpa disadari, peluang dan kebutuhan untuk korupsi kemudian terjadi karena, bila kesatuan tidak memberi, itu berarti harus dicari dari pihak lain. Bila itu terus berlanjut, akan membawa masalah baru dan jauh lebih mahal bagi Polri.

Situasi hampir serupa juga terjadi ketika komunitas Polri berespons terhadap personil yang menunjukkan indikasi bermasalah. Umumnya, sikap sensitif

jarang muncul, ditandai dengan banyaknya kata “cengeng” terdengar. Sebaliknya, semangat korps yang kuat juga kerap kali menghalangi seorang anggota Polri untuk terlihat bermasalah.

Dalam hal ini, sebenarnya, keringat juga dikeluarkan oleh keluarga anggota-anggota Polri di rumah, yang harap-harap cemas dengan kemaslahatan suami atau isteri mereka saat bertugas. Bedanya, keringatnya terasa dingin. Oleh karena itu, lekas tarik anggota yang

menunjukkan indikasi bermasalah.

Mengatasi berbagai hal di atas, kendali manajerial yang kuat dari pimpinan Polri di berbagai level amat dibutuhkan. Dan, jangan sampai malah ikut terjebak dalam situasi kacamata kuda pula. Keringat yang dikeluarkan para manajerial, yang adalah perwira Polisi, saat merancang mulai dari kebijakan Kepolisian, strategi operasi hingga piranti pendukungnya, sebenarnya berarti menghindari kemungkinan bagi para bintang dan tamtama untuk keluar keringat, atau bahkan darah.

